



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI DIGITAL

PELAYANAN PUBLIK & ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

**AKSELERASI TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL INDONESIA
MELALUI PENGUATAN KAPASITAS TATA KELOLA & IMPLEMENTASI**

Jakarta, 16 Juli 2024

Visi Indonesia Emas 2045



Presiden Jokowi
meresmikan
peluncuran RPJPN
2025-2045
Kamis 15 Juni 2023

Alignment pada inisiatif
strategis **percepatan
transformasi digital
(GovTech)**



**Future Governance
(Governance 5.0)**

Perubahan paradigma yang
semula “pemerintah
mengatur masyarakat”
menjadi “**pemerintah
bekerja bersama
masyarakat**”/masyarakat
sebagai mitra

Misi 1. Transformasi Sosial

a. Kesehatan untuk Semua

- b. Pendidikan Berkualitas yang merata
- c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

**Transformasi
Indonesia**

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- b. Penerapan Ekonomi Hijau
- c. Transformasi Digital
- d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- e. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

Regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata Kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi

- a. Hukum berkeadilan, ketahanan berdaya gentar kawasan keamanan nasional
- a. Stabilitas ekonomi makro
- b. Ketangguhan diplomasi

**Landasan
Transformasi**

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- a. Beragama dan berkebudayaan maju
- b. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender
- c. Lingkungan hidup berkualitas
- d. Berketahanan energi, air, kemandirian pangan
- e. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

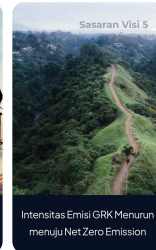
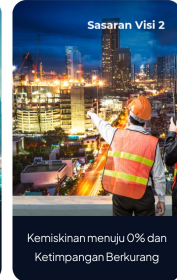
Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

**Kerangka
Implementasi
Transformasi**

Arah Kebijakan



Transformasi Digital ditopang 4 pilar berupa:

(1) Pemerintahan Digital, (2) Ekonomi Digital, (3) Masyarakat Digital, (4) Infrastruktur Digital sebagai pondasi

Contoh Sukses Transformasi Digital di Berbagai Negara

Contoh sukses di Pilar Pemerintahan Digital

India



Mempersingkat 40 tahun pembangunan, dicapai dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun¹

Penerapan **Aadhaar (ID)**, **UPI (Payment)** & **DEPA (Data Exchange)**

Contoh sukses di Pilar Ekonomi Digital

Estonia



Pertumbuhan PDB per kapita 10x lipat dalam 20 tahun²

Penerapan **X-Road (platform interoperabilitas data)**

Contoh sukses di Pilar Masyarakat Digital

Tiongkok



Penurunan kemiskinan eksponensial dari 5,7% ke 0,6% selama 5 tahun (2015-2019)³

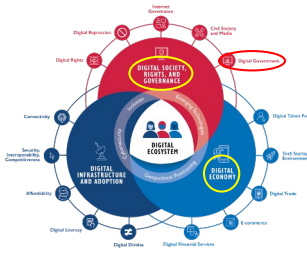
Penerapan **berbagai platform** dalam program **inklusi keuangan digital**

Sumber: ¹ Outlook India
² Bank Dunia
³ China Foundation for Poverty Alleviation (CFPA)

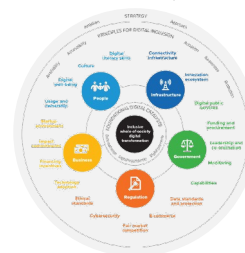
Referensi Kerangka Transformasi Digital

International Best Practices Kerangka Transformasi Digital (USAID & PBB), serta konsep Visi Indonesia Digital 2045, memiliki 4 Pilar utama yakni **Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, Masyarakat Digital, dan Infrastruktur Digital**

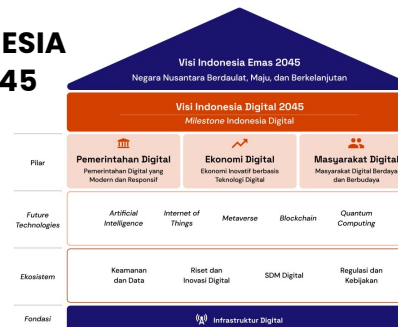
USAID DIGITAL ECOSYSTEM FRAMEWORK



UN DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK



VISI INDONESIA DIGITAL 2045



Ilustrasi Indikator Kesuksesan Penerapan 4 Pilar Transformasi Digital

Pemerintah Digital

Peningkatan Indeks Internasional:

1. E-Government Development Index (EGDI)
2. Govtech Maturity Index (GTMI)
3. Global Cybersecurity Index (GCI)

Ekonomi Digital

1. Kontribusi Ekonomi Digital pada PDB
2. Peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Digital

Masyarakat Digital

1. Peringkat Indeks Masyarakat Digital (APAC)
2. Peningkatan tenaga kerja sektor TIK terhadap total tenaga kerja
3. Peningkatan Indeks Literasi Digital Masyarakat

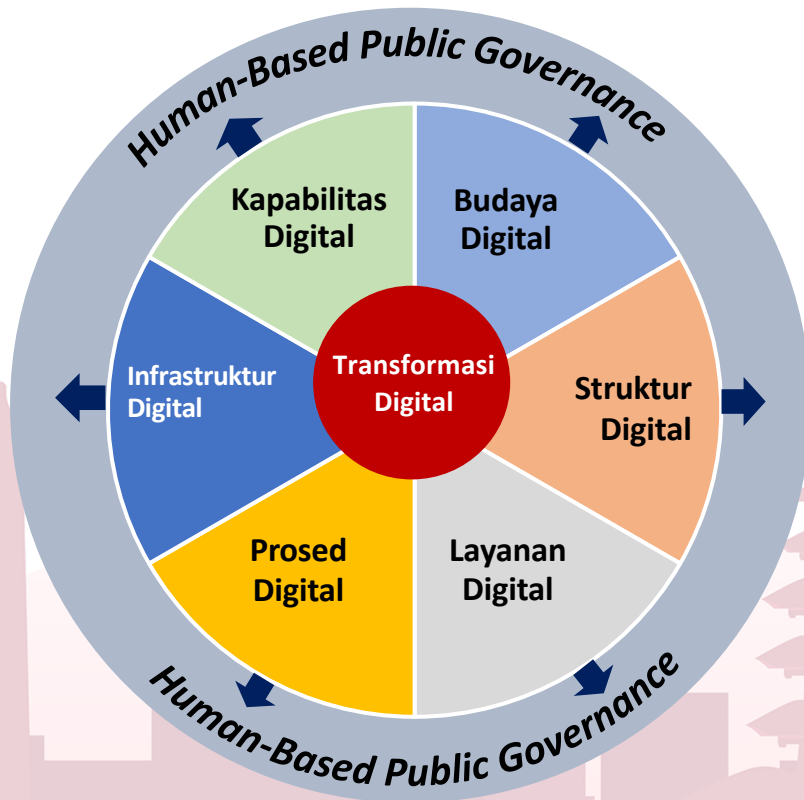
Infrastruktur Digital

1. Perluasan jangkauan Seluler (*Mobile Broadband Coverage*)
2. Rata-rata kecepatan jaringan seluler
3. Peningkatan aksesibilitas pada daerah 3T

FRAMEWORK *GRAND DESIGN* REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (**GDRBN**) 2025-2045

Transformasi Digital

Menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia (**World Class Bureaucracy**) dalam mendukung visi **INDONESIA MAJU** menuju **INDONESIA EMAS 2045**



Human-Based Public Governance

Birokrasi yang berfokus pada penyediaan pelayanan publik berbasis siklus hidup manusia (dari lahir sampai kematian) melalui **penggunaan teknologi digital dan pelayanan terpadu.**

KERANGKA TRANSFORMASI REFORMASI BIROKRASI

Indonesia Maju untuk Indonesia Emas 2045



REFORMASI BIROKRASI UNTUK PELAYANAN PUBLIK PRIMA

Transformasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

DULU
 Parsial berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kinerja instansi belum sepenuhnya selaras mendukung pencapaian target pembangunan nasional



KE DEPAN
 Terpadu berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).

Tercipta **keterpaduan kinerja antar-K/L dan Pemda** untuk mencapai outcome bersama dalam kerangka pembangunan nasional

Transformasi Digital & Keterpaduan Layanan Digital

Menuju Indonesia Digital dengan Govtech:

- Quick Wins SPBE: Keterpaduan 9 Layanan Prioritas
- Berorientasi *Citizen Centric* bukan *Government Centric*
- Untuk pertama kalinya, RI menuju negara dengan **keterpaduan layanan digital**

Digital Public Infrastructure:

- Digital ID
- Digital Payment
- Data Exchange

Smart ASN

Portal Layanan Publik

Tata Kelola Birokrasi di IKN

Kompetensi, Budaya, Struktur, Proses, Infrastruktur Digital

Antisipatif

Prediktif

Solutif

UU 20/2023 Aparatur Sipil Negara | UU 1/2024 Informasi & Transaksi Elektronik | UU 27/2022 Perlindungan Data Pribadi
Perpres SPBE | Perpres Arsitektur SPBE Nasional | Perpres Satu Data Indonesia
Perpres Percepatan Transformasi Digital & Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Tonggak Transformasi Digital yang Ditandatangani Presiden Joko Widodo

TEKNOLOGI UNTUK MEMUDAHKAN BIROKRASI PELAYANAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

SPBE Summit – Istana Negara – 27 Mei 2024



Joko Widodo

@jokowi



Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, hingga kemudahan urusan masyarakat.

GovTech INA Digital, teknologi untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sebelumnya terdapat 27 ribu aplikasi level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi. Maka, GovTech INA Digital diharapkan membuat semua terintegrasi, meminimalisasi birokrasi yang rumit, serta mengakselerasi sistem digital di sejumlah layanan prioritas.

GovTech INA Digital harus digunakan untuk memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik, juga meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data demi pemanfaatan GovTech INA Digital.



TANTANGAN: KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL YANG EFEKTIF



KONDISI SAAT INI



Masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi yang rumit & terduplikasi



Proses layanan yang masih kompleks, panjang & tidak transparan



Kebutuhan "*fotocopy* KTP" untuk mengakses layanan



Pengisian data yang berulang kali untuk mengakses layanan



KONDISI SEHARUSNYA



1 Portal untuk berbagai layanan, dengan akses *single-sign on* (SSO)



Proses yang **simpel, cepat, mudah, & transparan**



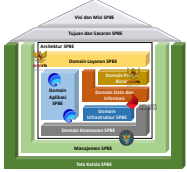
Tidak perlu *fotocopy* KTP. Akses dengan **identitas digital** untuk **keamanan data pribadi**



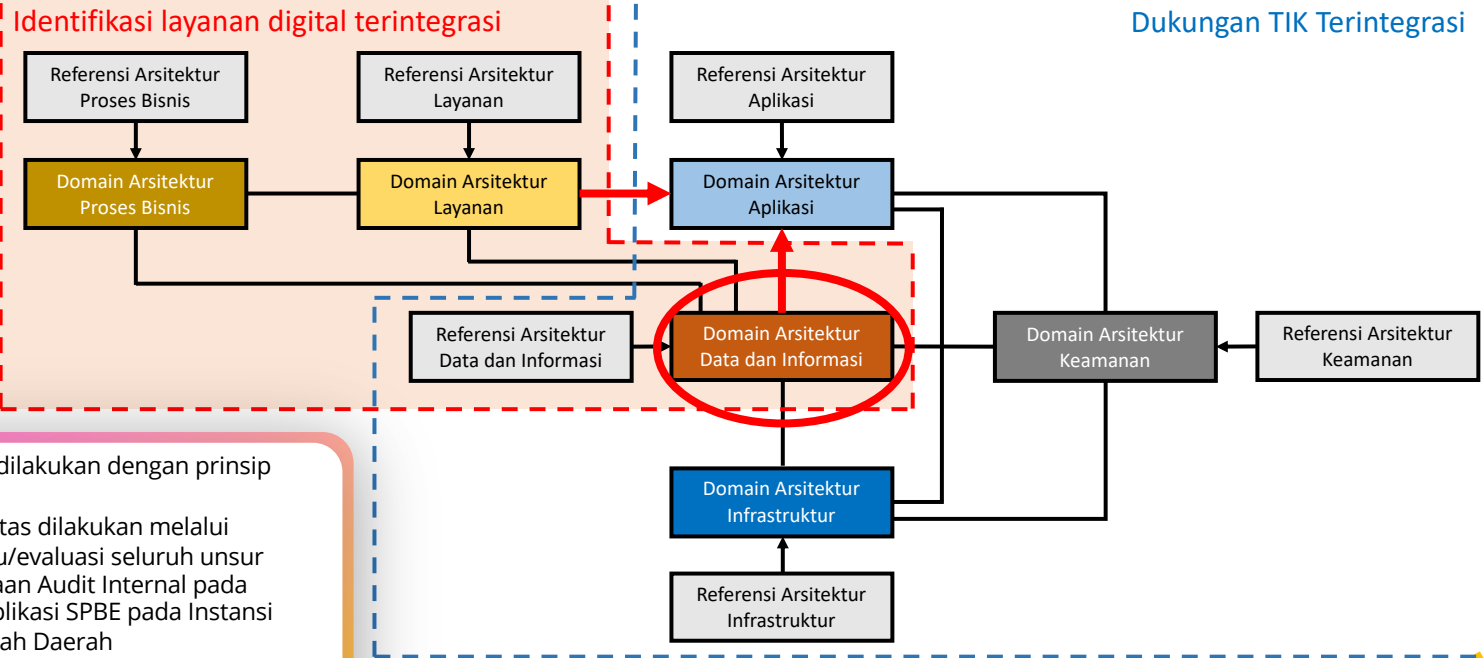
Satu kali isi data untuk berbagai layanan



KETERKAITAN ANTAR DOMAIN DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE RELASI DENGAN PELAKSANAAN AUDIT SPBE



Arsitektur SPBE Nasional



1. Penerapan SPBE dilakukan dengan prinsip akuntabilitas
2. Prinsip akuntabilitas dilakukan melalui pelaksanaan reviu/evaluasi seluruh unsur SPBE & pelaksanaan Audit Internal pada infrastruktur & aplikasi SPBE pada Instansi Pusat & Pemerintah Daerah
3. Audit SPBE memiliki relasi kuat dengan pelaksanaan PP 60/2008 tentang **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**, Pasal 18 ayat 3 huruf c: "**Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi**"

AUDIT SPBE

SPBE TIDAK HARUS MENAMBAH APLIKASI

Perlu dihindari:

**Satu Inovasi,
Satu Aplikasi**



PELAYANAN EKSTERNAL:
Warga tidak harus download begitu banyak aplikasi, bikin begitu banyak akun, isi berulang begitu banyak data.

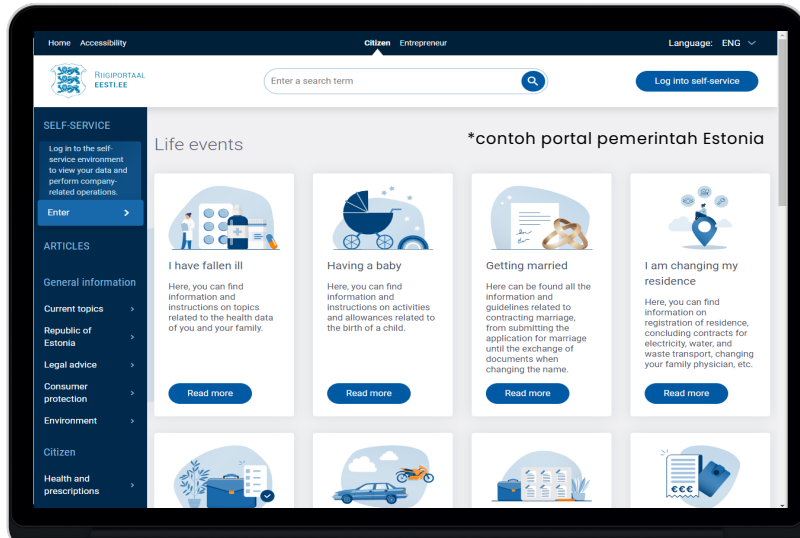


PELAYANAN INTERNAL:
Integrasi/interoperabilitas antar-sistem di lingkup pemerintahan.

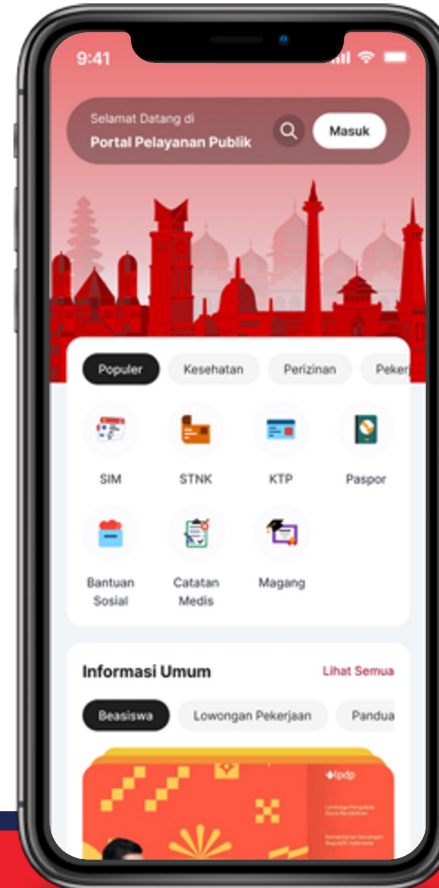
Visi Layanan Digital Indonesia

PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL: ESTONIA

*Menu langsung cara mendapatkan layanan pekerjaan, kesehatan, kependudukan, bansos, kesehatan, persalinan, dan lainnya.
(layanan bukan lagi government centric, melainkan citizen centric)*



INISIASI AWAL DESAIN PORTAL NASIONAL INDONESIA



**NEGARA HADIR
KAPAN PUN,
DI MANA PUN.**

**CEPAT
MUDAH
MURAH**

Transformasi masif
layanan negara
dengan teknologi.



5 Layanan Mendukung Percepatan Pembangunan Portal Layanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Layanan oleh RSUD Dr. Soetomo

Pendaftaran Online SIM Rumah Sakit, Booking Ambulans, Sistem Informasi Pasien dan Ketersediaan Kamar



Layanan oleh DPMPTSP

Layanan perizinan terpadu



Layanan oleh BKD (Rumah ASN dan Simaster)

Kenaikan pangkat, layanan webinar, database kepegawaian di Jatim



Klinik Hoaks

Pengecekan berita hoaks



Layanan oleh Diskominfo (Open Data Jatim)

Terdapat 47 dataset Sebagai media monitoring

CONTOH KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL PEMDA PROVINSI JAWA TIMUR

KOTA SURABAYA

Satu Aplikasi untuk Semua Layanan Pemerintah

Pengaduan

- Service Desk
- Whistleblowing System
- PPID
- Media Center
- SP4N Lapar

Perizinan

- SSW Alfa (Back Office)
- Klampid New Generation
- E-Ruttlahu (manev pengajuan ruttlahu)
- IMB (verifikasi berkas)
- SKRK (verifikasi berkas)
- eRusun (manev pengajuan rumah susun)

GRMS (Government Resources Management System)

- E-Performance
- E-Delivery
- E-Planning
- E-Accounting
- E-Revenue
- E-Project
- E-Controlling
- E-Payment

Manajemen Kinerja

- E-SDM
- E-Surat
- PPNIS (Penyidik PNS)
- SAKIP
- Peken

Kesehatan

- SIM RSUD Bhakti Dharma Husada
- SIM RSUD Dokter Mohamad Soewardie
- Aplikasi Dinas Kesehatan

Pendidikan

- Profil Sekolah (database)
- E-Office (administrasi layanan pendidikan)

Kemiskinan

- Sayang Warga (survey)
- Padat Karya (monitoring intervensi pekerjaan)
- Si Keluarga Miskin (verifikasi keluarga miskin)
- ASSIK (aplikasi info loker)

KABUPATEN BANYUWANGI

LAYANAN SMART KAMPUNG

LAYANAN ANTRIAN ONLINE

mendaftar antrian secara online di Mal Pelayanan Publik, Rumah sakit dan Puskesmas

LAYANAN PENGADUAN DAN KEDARURATAN

tersedia kanal untuk pengaduan masyarakat dan menghubungkan dengan call center 112

tersedia total 32 Perizinan Tenaga Kesehatan yang terhubung SISDMK. Juga perizinan untuk reklame, penelitian, KKPR, dll.



DATA TERHUBUNG

terhubung dengan data kemiskinan, stunting, anggota keluarga, penerima bansos, pajak, penerima pupuk subsidi, dll.

MPP DIGITAL

layanan perijinan dan kependudukan langsung melalui smartphone

UMKM

display produk UMKM terhubung lgg dengan penjual

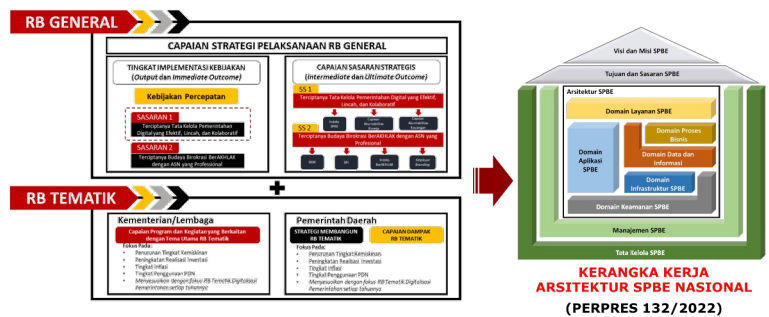
LAYANAN KEPENDUDUKAN

terdapat 61 Layanan Adminduk mulai dari membuat KTP baru hingga Akta Kematian.

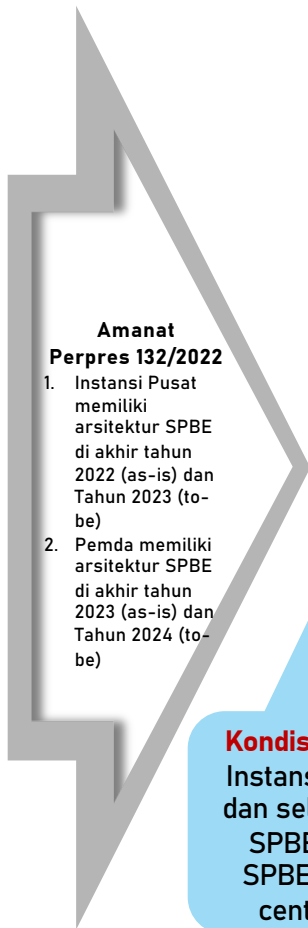
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PENILAIAN RB INSTANSI



Pemanfaatan SIA-SPBE membantu IPPD memahami bagaimana implementasi arsitektur SPBE untuk mencapai sasaran RB General ke-1, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”**



SIA SPBE → <https://arsitektur.spbe.go.id>



Amanat Perpres 132/2022
1. Instansi Pusat memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2022 (as-is) dan Tahun 2023 (to-be)
2. Pemda memiliki arsitektur SPBE di akhir tahun 2023 (as-is) dan Tahun 2024 (to-be)

Komponen penilaian RB pada indikator arsitektur SPBE pada SIA-SPBE:

0 = belum ada

1 = tersedia arsitektur as-is

2 = tersedia arsitektur to-be

3 = tersedia peta rencana SPBE

4 = telah melaksanakan clearance belanja SPBE

5 = reviu dan evaluasi

Kondisi to-be arsitektur SPBE
Instansi yang telah ditetapkan dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional pada SIA - SPBE, mengutamakan user centric dan *life - journey*

Kondisi as-is arsitektur SPBE
Instansi yang telah ditetapkan dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional pada SIA - SPBE

TALENTA ASN DIGITAL MENUJU BIROKRASI DIGITAL

Rekrutmen ASN mengutamakan kualifikasi SDM yang telah memiliki talenta digital, baik untuk pengelola SPBE melalui penyelarasan dengan kamus kompetensi digital dan bagi ASN secara umum (Non-Pengelola SPBE) melalui kompetensi dasar literasi digital, untuk wujudkan Birokrasi Digital

PENGUNA SPBE:

Untuk pegawai ASN secara umum (Non-Pengelola SPBE), berupa **kompetensi dasar literasi digital (sebagai kompetensi umum)**, untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas

PENGELOLA SPBE:

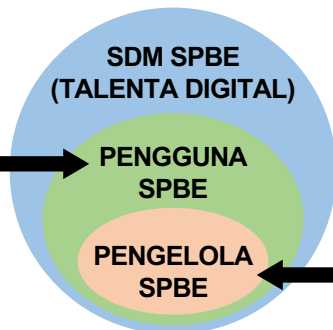
Pegawai ASN dan pihak-pihak lain (misal: pejabat, PPNPN) dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **mengelola penerapan SPBE (Pengelola SPBE)**.

KOMPETENSI SPBE

pengetahuan dan keterampilan yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang terkait dengan **pengelolaan penerapan SPBE** dan/atau **pemanfaatan layanan SPBE**.

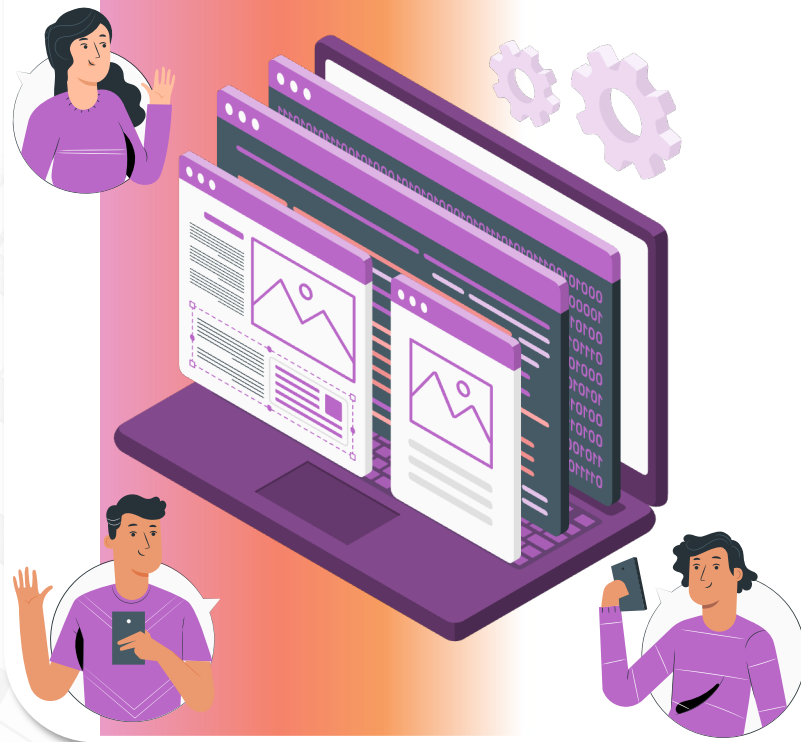
Program Literasi Digital oleh
Kementerian Kominfo

Program Literasi Digital yang disediakan oleh
setiap instansi, dikoordinasikan oleh LAN



Peraturan perundang-undangan terkait
Manajemen ASN (UU ASN 20/2023)

Kamus Kompetensi Teknis Pengelola SPBE
(Mengutamakan keahlian dan sertifikasi SDM TIK)



MENUJU MASA DEPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Future Governance (Governance 5.0)

Perubahan paradigma yang semula
“Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi
“Pemerintah bekerja bersama masyarakat”/
Masyarakat sebagai mitra
(a mindset shift: “from governing for citizens to governing with citizens”)

**Penggerak/
Enabler:**

**Basis
Data**

Data-Driven



Cryptography as a Services

**Transformasi
Digital**

Digital by Design



Security by Design

**SDM
Berdaya
Saing**

Digital Culture



Security Awareness

EKOSISTEM KOLABORATIF UNTUK INOVASI BIROKRASI



AKADEMISI

Memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dan inovasi dengan data & analisa akademik (*evidence-based policy*)



MEDIA

Mendukung internalisasi kebijakan reformasi birokrasi kepada *stakeholder* serta menyampaikan berbagai praktik baik/inovasi melalui komunikasi dua arah



SEKTOR SWASTA

Turut terlibat dalam perumusan kebijakan dan berkolaborasi dalam implementasi pelayanan publik melalui inovasi-inovasi dari sektor swasta



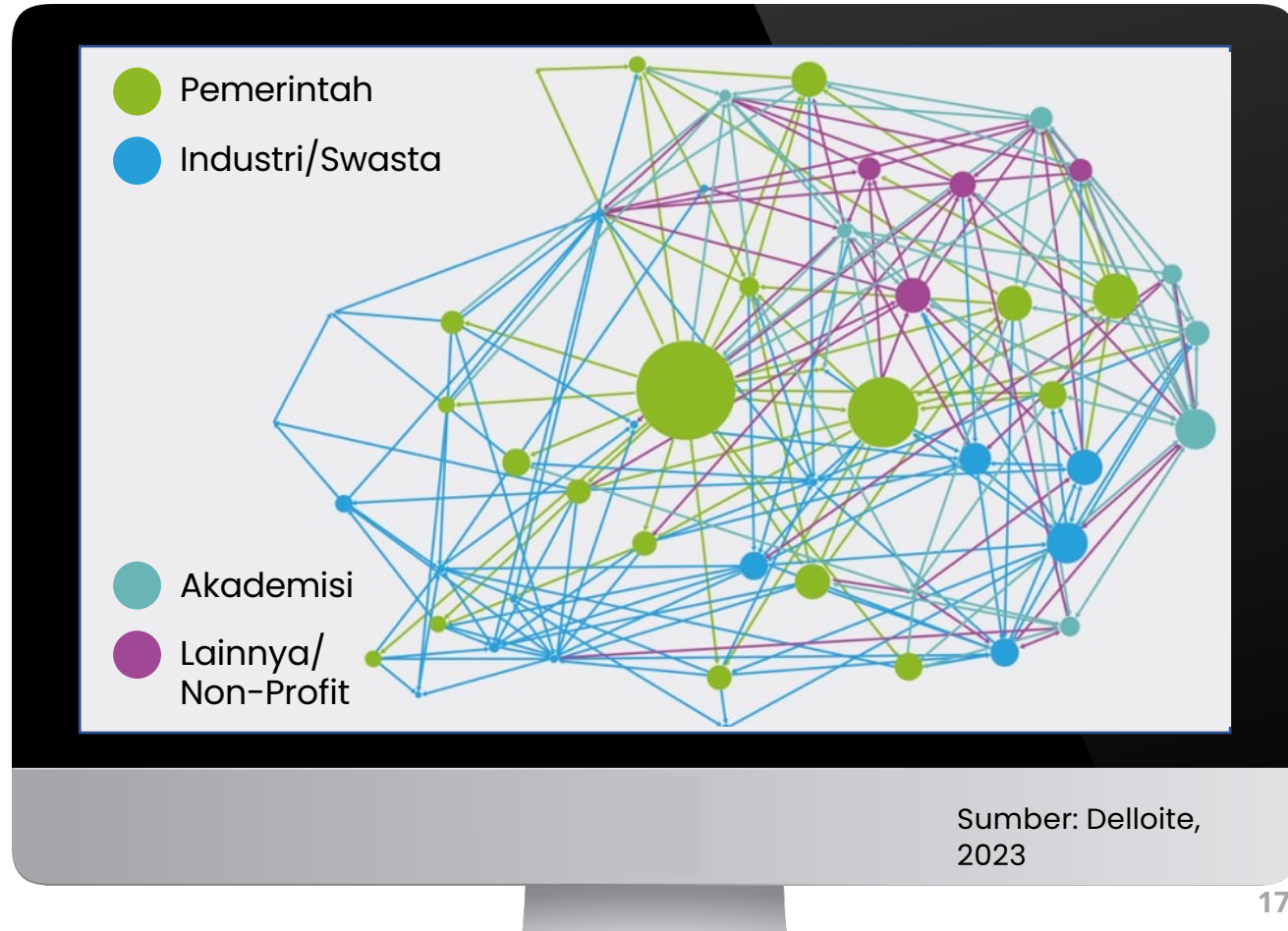
KOMUNITAS (MASYARAKAT DAN GENERASI MUDA)

Menyampaikan gagasan, ide, dan inovasi serta menjembatani pemerintah dan masyarakat

Peta jaringan *innovation tools* menyoroti saling ketergantungan antaraktor dan *stakeholder*

TIDAK ADA SATU AKTOR PUN YANG DAPAT MENCAPAI TUJUAN TANPA MEMPENGARUHI AKTOR LAIN (KOLABORASI)

SAATNYA KOLABORASI, BUKAN SEKADAR KOMPETISI





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH